

DETERMINAN NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH – STUDI PADA SKPK KABUPATEN PIDIE

Weni Nuranda*¹, Heru Fahlevi*²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: hfahlevi@unsyiah.ac.id*²

Abstrak

The purpose of this study is to examine the effect of human resource capacities, information technology utilization, accounting internal control and local government financial monitor on information value of local government financial reporting. The population in this study is 38 Working Units (or Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/SKPK) in kabupaten Pidie. This study involved all the SKPK as research sample. Data was collected through questionnaires that distributed and filled by two respondents from each SKPK i.e. Financial Administration Officers (or Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK) and Accounting Staffs. Multiple regression method was used to analyses the collected data. This study confirms that human resource capacities, information technology utilization, accounting internal control and local government financial monitor determine the information value of regional government financial reporting of SKPK Kabupaten Pidie both individually and collectively.

Keywords: *human resource capacities, information technology utilization, accounting internal control, financial monitor, information value, SKPK*

1. Pendahuluan

Tingginya harapan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah membuat kebutuhan atas informasi keuangan semakin meningkat khususnya informasi keuangan pemerintah daerah. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah disyaratkan memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang didefinisikan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Nanda (2016) Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah wajib mengungkapkan laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban memberikan informasi mengenai transparansi pelaporan keuangan yang jujur dan terbuka.

Informasi yang dapat diandalkan dan mampu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang memiliki nilai. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan sebuah keputusan (Suwarjono, 2005). Nilai tersebut dapat ditentukan oleh manfaat dan biaya

penempatannya (Puspitawati dan Anggadini, 2015). Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar di bandingkan dengan biaya penempatannya. Disamping itu, keandalan dan ketepatan waktu penyajian informasi juga merupakan kriteria dari nilai informasi laporan keuangan (Wansya et al., 2012).

Penelitian terdahulu menemukan bahwa keterandalan dan ketepatan waktu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh hasil kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi (Ariesta, 2003). Penelitian Pratiwi et al., (2015) menunjukkan hasil yang sejalan yaitu semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi menentukan proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Faktor lain yang menentukan nilai informasi pelaporan keuangan pada penelitian terdahulu adalah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (Sari et al., 2014) dan pengendalian intern akuntansi (Primayana et al., 2014).

Penelitian ini dilakukan pada SKPK kabupaten pidie dengan alasan bahwa Kabupaten Pidie memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa penatausahaan laporan keuangan di kabupaten tersebut belum optimal termasuk antara SKPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Nilai Informasi

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Indriasari dan Nahartyo, 2013). Suwarjono (2005) mendefinisikan nilai informasi sebagai kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, nilai informasi pelaporan pemerintah merujuk kepada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam mengambil keputusan, terbebas dari kesalahan yang substansial dan diandalkan dan dibandingkan (Fernanda, 2008).

Wansyah et al.,(2012) didalam penelitiannya menyatakan bahwa informasi yang tersajikan mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keterandalan adalah bagaimana suatu informasi memiliki kemampuan untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya atau valid. Tepat waktu berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dimaksudkan bahwa informasi yang disajikan dengan tepat waktu maka akan berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Indriasari dan Nahartyo (2008) mengemukakan indikator untuk menentukan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: a) transaksi keuangan yang wajar dan jujur, b)

neraca, LRA, cacatan atas laporan keuangan disajikan, c) dapat diuji, d) adanya rekonsiliasi, e) kebutuhan akan informasi, f) ketersediaan informasi, g) tersajinya laporan keuangan secara sistematis.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki (Anggeri dan Riduwan, 2014). Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Menurut Winidyaningrum et al., (2010) Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Wahyuno (2004:12) untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua hal pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya.

Firdaus et al.(2015) menyatakan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPK dan Staf sub bagian akuntansi akan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan seluruh informasi keuangan pemerintah daerah mulai dari perencanaan anggaran hingga informasi realisasi anggaran yang akan disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah . Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran variabel ini dapat menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Havesi (2005) : a) pendidikan, b) pengalaman, c) keahlian, d) koordinasi, e) penguasaan teknis.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengertian teknologi informasi menurut Abdul Kadir dan Terra (2003:2) bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, namun juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh organisasi sector publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, dinyatakan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan mengedarkan akses antar unit kerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yang dikembangkan oleh Thomson et al (1994) : a) intensitas pemanfaatan, b) frekuensi pemanfaatan, c) aplikasi/perangkat lunak yang digunakan, d) relevansi hasil.

Pengendalian Internal Akuntansi

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk tetap memelihara keakuratan data, melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian dan tindakan korupsi dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang tepat diharapkan untuk membangun pengendalian internal di lingkungan pemerintahan (Rama dan L.jones,2008:8). Sistem pengendalian internal yang optimal mampu meyakinkan *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Bukan hanya itu, pengendalian internal juga diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta memberikan perlindungan terhadap data organisasi dari berbagai ancaman, salah satunya adalah penyelewengan atau sabotase sistem (Roshanti et al,

2014). Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) adalah: a) sistem dan prosedur akuntansi, b)tersedia daftar, c)otorisasi transaksi, d) cacatan.

Pengawasan Keuangan Daerah

Siswanto (2013:4) menyatakan pengawasan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan adalah salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan mewujudkan suatu sistem pengawasan yang efektif baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal diantaranya (Halim, 2004:308-309). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota, pengawas intern pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaanurusan desa.

Menurut Tausikal (2007) untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah mampu membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan (Fransisca,2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : Skedul pengawasan, b) standarisasi pengawasan, c) hubungan timbal balik.

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini menguji lima hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Pengendalian internal akuntansi dan Pengawasan keuangan daerah Bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- H₄ : Pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
- H₅ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK yang ada di lingkup Kabupaten Pidie. Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dan staf sub bagian akuntansi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 38 SKPK dengan 76 responden, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode sensus.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Responden diminta untuk menentukan alternatif pilihan jawaban terhadap masing-masing pertanyaan/pernyataan terkait. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan langsung menyerahkan kuesioner pada responden yang dituju dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Ghazali (2013:6) menyatakan bahwa analisis regresi adalah usaha menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Perumusan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

Y	= Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
X ₁	= Kualitas Sumber Daya Manusia
X ₂	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X ₃	= Pengendalian Internal Akuntansi
X ₄	= Pengawasan Keuangan Daerah
ϵ	= Error

Penelitian ini merupakan penelitian sensus, jadi tidak dilakukan pengujian signifikan. Menurut Sugiono (2009) pengujian hipotesis penelitian yang tidak menggunakan sampel tidak ada istilah signifikan karena signifikan artinya hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat berlaku ke populasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Pengumpulan data dilakukan dari 38 SKPK, 1 diantaranya tidak bersedia menjadi lokasi penelitian. Kuesioner yang disebar berjumlah 76 kuesioner, 2 kuesioner untuk masing-masing SKPK berdasarkan kriteria jumlah responden, namun hanya 74 kuesioner yang kembali (nilai responden rate = 97%).

Uji validitas dilakukan dengan mengkolerasi masing-masing variabel dengan menggunakan *Pearson Product-moment coefficient* melalui program SPSS menunjukkan semua pernyataan kuesioner valid.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir	Nilai R_{hitung}	Nilai R_{tabel} (N=74)	Keterangan
1	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	A1	0,697	0,225	Valid
		A2	0,746	0,225	Valid
		A3	0,762	0,225	Valid
		A4	0,821	0,225	Valid
		A5	0,757	0,225	Valid
		A6	0,795	0,225	Valid
		A7	0,818	0,225	Valid
		A8	0,771	0,225	Valid
		A9	0,678	0,225	Valid
		A10	0,673	0,225	Valid
		A11	0,817	0,225	Valid
2	Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)	B1	0,698	0,225	Valid
		B2	0,238	0,225	Valid
		B3	0,771	0,225	Valid
		B4	0,706	0,225	Valid
		B5	0,790	0,225	Valid
		B6	0,691	0,225	Valid
		B7	0,738	0,225	Valid
		B8	0,691	0,225	Valid
		B9	0,740	0,225	Valid
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	C1	0,788	0,225	Valid
		C2	0,771	0,225	Valid
		C3	0,692	0,225	Valid
		C4	0,749	0,225	Valid
4	Pengendalian Internal Akuntansi (X_3)	D1	0,766	0,225	Valid
		D2	0,795	0,225	Valid
		D3	0,872	0,225	Valid
		D4	0,822	0,225	Valid
		D5	0,719	0,225	Valid
5	Pengawasan Keuangan (X_4)	E1	0,634	0,225	Valid
		E2	0,823	0,225	Valid
		E3	0,818	0,225	Valid
		E4	0,809	0,225	Valid
		E5	0,792	0,225	Valid
		E6	0,666	0,225	Valid

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengujian ulang.

Instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel apabila nilai alphanya lebih besar dari 0,6 (Sekaran dan Bougie, 2013:317).

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah tem	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Ket
1	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	11	0,774	Handal
2	Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)	9	0,754	Handal
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	4	0,794	Handal
4	Pengendalian Internal Akuntansi (X_3)	5	0,804	Handal
5	Pengawasan Keuangan (X_4)	6	0,789	Handal

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka pengukuran reliabilitas/kehandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* > 0.60.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan regresi. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 74 kuesioner, diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), pengendalian internal akuntansi (X_3) dan pengawasan keuangan (X_4) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (Y). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	β	Std. Error
Konstanta	0,734	0,473
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,114	0,126
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,260	0,129
Pengendalian Internal Akuntansi	0,309	0,144
Pengawasan Keuangan	0,349	0,151
Koefisien Korelasi (R)	= 0,869	
Koefisien Determinasi (R^2)	= 0,755	
Adjusted R Square	= 0,724	
F Hitung	= 24,618	
Sig. F	= 0,000 ^a	

Sumber: Data Primer Diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,734 + 0,114X_1 + 0,260X_2 + 0,309X_3 + 0,349X_4 + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,734 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), pengendalian internal akuntansi (X_3) dan pengawasan keuangan (X_4) sama dengan nol (0), maka besarnya nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (Y) adalah 0,734 satuan pada skala interval.

Berdasarkan Tabel 3, koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen $\neq 0$ dimana $\beta_1 = 0,114$, $\beta_2 = 0,260$, $\beta_3 = 0,309$ dan $\beta_4 = 0,349$. Hal ini berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a), artinya

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah pada SKPK Pidie.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh kualitas sumber daya manusia maka akan semakin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Disini, kemampuan sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal. Sumber daya manusia yang berkualitas juga mampu menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, hal ini disebabkan karna sumber daya tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyampain laporan keuangan maka semakin cepat proses pengambilan keputusannya (Mardiasmo, 2002:146).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wansyah et al., (2012), Roshani et al., (2014), dan Pratiwi et al., (2015) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemerintah harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan mengedarkan akses antar unit kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Wansyah et al.,(2012) dan Pratiwi et al.,(2015) yaitu dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas yang meliputi

teknologi komputer dan teknologi komunikasi maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh pengendalian internal akuntansi maka akan semakin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Pratiwi et al., (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa pengawasan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh pengawasan keuangan maka akan semakin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Pengawasan keuangan daerah mampu membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan (Fransisca, 2015). Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernanda (2008) dan Armando (2013).

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 86,9%, artinya nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie mempunyai hubungan sangat erat dan positif dengan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai

informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie sebesar 75,5% dan sisanya sebesar 24.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari pada penelitian ini misalnya tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan lain-lain.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (3) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (4) pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (5) pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, antara lain; (1) Penelitian ini hanya terbatas pada SKPK Pidie dengan jumlah responden sebanyak 74 orang pegawai sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian selanjutnya menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda. (2) Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner tertutup, sehingga responden terbatas untuk memberikan jawaban terhadap pernyataan kuesioner yang tidak dimengerti.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik dengan menambah variabel lain dan melakukan penelitian di daerah lain atau ditingkat yang lebih tinggi..

Daftar Pustaka

Anggraeni, Dian T., Riduan, Akhmad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan

- Pemerintah Daerah. *Jurnal ilmu & Riset Akuntansi*.3:3.
- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Melalui (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/52>). Diakses 23 juli 2016.
- Fernanda, Hendrick. 2008. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh). Melalui (http://www.e-jurnal.com/2016/03/pengaruh-pemanfaatan-teknologi_26.html). Diakses 12 Agustus 2016.
- Firdaus., Nadirsyah, & Fahlevi, Heru. 2015. Pengaruh keualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*,4:1.
- Fransisca.2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia,Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komitmen organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Labuhan Batu). *Jom Fekon*, 2:2.
- Ghozali, Imam. 2013.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Havesi, G. Alan. 2005. Standars for Internal Control in New York State Governmant. Melalui (www.osc.state.ny.us). Diakses pada 25 juli 2016
- Indriasari, D., Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten OganIllir). *Kumpulan Simposium Nasional Akuntansi XI di Pontianak*, 23-24 Juli.
- Jogiyanto.2004. *Pengenalan Komputer, Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta: Andi
- Kadir, Abdul & Terra Ch. Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mentri Dalam Negeri. *Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*
- _____, *Nomor 60 Tahun 2004, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Nanda, Riska & Suparno. 2016. Pengaruh kemandirian keuangan daerah,Diferensiasi fungsional dan Spesialisasi fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*.3:2.
- Pratiwi, Putu R., I made Pradana A., dan Ananta Wikrama T. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Tambanan). *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3:1.

- Primayana, Kadek H., Anantawikrama T., Nyoman Ari S.D. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng). *e-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2:1
- Puspitawati, Lilis., Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rama, Dasaratha V & Frederick L.J. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roshanti, Arina., Edy Sujana, & Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2:1.
- Roshanti, Arina., Edy Sujana, & Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2:1.
- Sari, Shinta P., Banu Winoto. 2014. Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah Di Tinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Seminar Nasional dan Call Paper*, 418-425.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. *Research Method for Business*. Sixth Edition. Italy: Printer Trento Srl.
- Siswanto. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8:1.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer*: Yogyakarta : Andi.
- Wansyah, Hendra., Darwanis., dan Usman Bakar. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* 1: 1.
- Winidyaningrum & Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosuka wonosraten). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII* di Purwokerto: 1- 28
- Thompson Ronald, Christopher A and Howell Jane. 1991. *Personal Computing : Toward a Conceptual Model of Utilization*. MIS Quarterly. March 1991